

BAB V

KESIMPULAN

Jepang yang merupakan salah satu negara maju di wilayah Asia Timur memahami betul betapa pentingnya pendidikan bagi warga negaranya. Pemerintah Jepang memberikan perhatian yang serius mengenai pendidikan dan berperan penting terutama dalam penyusunan kebijakan dan kurikulum dalam pembelajaran di sekolah. Pemerintah juga menyiapkan anggaran yang besar untuk menunjang pendidikan yang berasal dari pendapatan nasional di mana siswa tidak perlu membayar biaya sekolah untuk wajib belajar (Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama). Sekolah Menengah Atas yang sudah bukan merupakan wajib belajar lagi juga mendapat bantuan biaya dari pemerintah. Bantuan ini disajikan dalam bentuk program *Free Tuition at Public High Schools and the High School Enrollment Support Fund* yang diterapkan pada tanggal 1 April 2010. Kebijakan ini berisi mengenai biaya sekolah gratis bagi sekolah negeri (*Free Tuition at Public High Schools*) dan bantuan biaya untuk pembayaran sekolah bagi siswa-siswa di sekolah yang mengajukannya (*High School Enrollment Support Fund*).

Sekolah asing yang berada di Jepang dapat mengajukan untuk memperoleh bantuan dana pendidikan ini. Namun sekolah Korea Utara di Jepang tidak mendapatkan bantuan tersebut padahal sekolah asing lain mendapatkannya. Alasannya adalah kelompok *Zaitokukai* yang merupakan kelompok anti-korea menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah untuk tidak memberikan bantuan dana pendidikan bagi sekolah Korea Utara di Jepang karena selain tidak memenuhi syarat, kelompok *Zaitokukai* mengindikasikan sekolah Korea Utara

mengajarkan nilai-nilai komunisme dan menjadi tempat untuk mendidik mata-mata yang dapat dilihat dari kurikulum dan buku penunjang yang digunakan di sekolah tersebut. *Zaitokukai* mengartikulasikan kepentingannya melalui *Hate Speech* yang kemudian mempengaruhi pembuat keputusan.

Selain itu, alasan pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada Sekolah Korea Utara adalah karena Korea Utara belum menyelesaikan masalah penculikan warga Jepang serta masih mengembangkan juga melakukan uji coba nuklir. Oleh karena itu, pemerintah Jepang merasa perlu untuk melakukan *carrot* dengan memberikan iming-iming subsidi pendidikan ke sekolah Korea Utara di Jepang jika pemerintah Korea Utara kooperatif untuk segera menyelesaikan masalah penculikan dan nuklir. Dalam kasus ini, memang belum terlihat hasil yang signifikan terkait dengan penyelesaian masalah penculikan maupun nuklir. Sasaran yang ingin diarahkan yaitu kepada pemerintah Korea Utara justru hanya mengenai masyarakat khususnya siswa-siswi yang tidak mempunyai kekuatan politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat.

Tentunya sangat menarik jika kita melihat bahwa masalah politik antara Jepang dengan Korea Utara justru berimbas kepada sektor pendidikan. Sekolah Korea Utara sebagai institusi pendidikan bagi etnis Korea di Jepang menerima tindakan diskriminatif baik dari pemerintah Jepang maupun masyarakat. Sungguh sangat disayangkan jika siswa-siswi yang bertujuan untuk menuntut ilmu di sekolah Korea Utara ini menjadi korban atas kejahatan atau perbuatan yang tidak mereka lakukan.